

PENGARUH IMPLEMENTASI PERENCANAAN STRATEGIS PEMBINAAN DAN PENGAWASAN INSPEKTORAT KOTA CILEGON DALAM MEWUJUDKAN VISI DAN MISI PEMERINTAH KOTA CILEGON

Afrida Sundari¹, Dini Fajar Lestari¹, Liza Mumtazah Darmawulan¹

¹Universitas Sultan Ageng Tirtayasa, Indonesia
Email: frecute2020@gmail.com, dini.cfm@gmail.com, lizam@untirta.ac.id

ABSTRACT

The importance of performance planning in the context of public organizations, such as the Inspectorate of Cilegon City, is crucial and has significant implications for organizational performance and effectiveness. The aim of this research is to understand how performance is implemented as a strategic instrument in achieving the vision and mission of the Inspectorate of Cilegon City and to determine the implementation of strategic planning for supervision and guidance of the city's inspectorate towards local government agencies (OPD). In the study titled "The Influence of the Implementation of Strategic Planning for Supervision and Guidance of the Inspectorate of Cilegon City in Achieving the Vision and Mission of the Cilegon City Government," quantitative research methods become a highly relevant and necessary approach. The outcome of this research is a vital contribution to improving good governance and effectiveness in Cilegon City, highlighting the importance of implementing strategic planning and the role of the Inspectorate in supervision and guidance to achieve the city government's vision and mission.

Keywords: Strategic planning, Inspectorate, Government

ABSTRAK

Pentingnya perencanaan kinerja dalam konteks organisasi publik, seperti Inspektorat Kota Cilegon, sangatlah krusial dan memiliki implikasi yang signifikan terhadap kinerja dan efektivitas organisasi. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui kinerja diimplementasikan sebagai instrumen strategis dalam mencapai visi dan misi Inspektorat Kota Cilegon dan untuk mengetahui implementasi perencanaan strategis pembinaan dan pengawasan inspektorat kota cilegon terhadap orgaisasi perangkat daerah (OPD). Dalam penelitian dengan judul "Pengaruh Implementasi Perencanaan Strategis Pembinaan dan Pengawasan Inspektorat Kota Cilegon dalam Mewujudkan Visi dan Misi Pemerintah Kota Cilegon", metode penelitian kuantitatif menjadi pendekatan yang sangat relevan dan diperlukan. Hasil dari penelitian ini adalah penelitian ini memberikan kontribusi penting dalam meningkatkan tata kelola pemerintahan yang baik dan efektif di Kota Cilegon, dengan menyoroti pentingnya implementasi perencanaan strategis dan peran Inspektorat dalam pembinaan dan pengawasan untuk mencapai visi dan misi pemerintah kota.

Kata kunci: Perencanaan strategis, Inspektorat, Pemerintah

INTRODUCTION

Salah satu tugas Inspektorat Kota Cilegon yang tertuang dalam Peraturan Walikota Nomor 7 Tahun 2020 yaitu Inspektorat mempunyai tugas membantu walikota membina dan mengawasi pelaksanaan urusan pemerintah yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan oleh perangkat daerah. Dalam rangka mendukung tercapainya tujuan dimaksud, Aparat Pengawas Intern Pemerintah (APIP) merupakan komponen penting dan bagian integral dari suatu sistem

pemerintahan daerah. Aparat Pengawas Intern Pemerintah (APIP) sebagai suatu fungsi manajemen harus mampu menjamin bahwa program dan kegiatan pemerintah daerah untuk mencapai tujuan dan sasaran sudah.

Dilaksanakan secara efektif, efisien sesuai dengan rencana kebijakan yang telah ditetapkan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Sistem pengawasan pemerintah daerah harus direncanakan secara tepat, cermat, profesional, terpadu serta berkesinambungan. Terciptanya tata kelola pemerintahan yang baik, bersih, dan berwibawa, profesional dan bertanggungjawab yang diwujudkan dengan sosok dan perilaku birokrasi yang efisien dan efektif serta dapat memberikan pelayanan yang prima kepada seluruh masyarakat, menuntaskan penanggulangan penyalahgunaan kewenangan dalam bentuk praktek-praktek KKN, melalui penerapan prinsip-prinsip tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*) pada semua tingkatan dan lini pemerintahan serta pada semua program dan kegiatan; pemberian sanksi yang seberatberatnya bagi pelaku KKN sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan peningkatan efektivitas pengawasan aparatur Negara melalui koordinasi sinergi pengawasan serta percepatan pelaksanaan tindak lanjut dari hasil-hasil pengawasan dan pemeriksaan.

Perencanaan kinerja merupakan suatu proses sistematis yang digunakan oleh organisasi untuk merumuskan, mengimplementasikan, dan mengevaluasi langkah-langkah strategis yang diperlukan guna mencapai tujuan dan visi misi yang telah ditetapkan. Menurut (Pratama et al., 2020) konsep ini menjadi salah satu instrumen penting dalam manajemen karena memberikan arah yang jelas bagi organisasi dalam mengarahkan upaya mereka menuju pencapaian yang diinginkan. Perencanaan kinerja dimulai dengan identifikasi tujuan dan sasaran yang ingin dicapai oleh organisasi. Tujuan ini kemudian diuraikan ke dalam target yang lebih spesifik dan terukur agar dapat dijadikan pedoman dalam proses pencapaian.

Organisasi akan merumuskan strategi-strategi yang tepat untuk mencapai tujuan tersebut, termasuk alokasi sumber daya yang diperlukan seperti tenaga kerja, anggaran, dan waktu. Selain sebagai alat untuk menetapkan tujuan dan strategi, perencanaan kinerja juga memainkan peran penting dalam koordinasi dan integrasi aktivitas organisasi. Menurut (Sasmito, 2022) dengan merencanakan langkah-langkah yang diperlukan untuk mencapai tujuan bersama, perencanaan kinerja membantu memastikan bahwa setiap bagian dari organisasi bergerak searah dan saling mendukung satu sama lain. Perencanaan kinerja juga melibatkan pengukuran dan evaluasi terhadap kinerja organisasi secara berkala. Hal ini dilakukan untuk memantau kemajuan pencapaian tujuan serta mengidentifikasi area-area yang memerlukan perbaikan atau penyesuaian strategi.

Perencanaan kinerja bukan hanya sekadar proses perumusan rencana, tetapi juga merupakan siklus yang terus berlangsung untuk meningkatkan kinerja organisasi secara berkelanjutan (Wongkar et al., 2021). Dalam konteks organisasi publik seperti Inspektorat Kota Cilegon, perencanaan kinerja menjadi semakin penting mengingat tuntutan untuk memberikan layanan yang

berkualitas dan akuntabel kepada masyarakat. Dengan memanfaatkan konsep perencanaan kinerja secara efektif, Inspektorat Kota Cilegon dapat mengoptimalkan penggunaan sumber daya yang dimiliki untuk mencapai visi dan misinya dalam menjalankan fungsi pengawasan dan pengendalian aparat sipil negara. Pentingnya perencanaan kinerja dalam konteks organisasi publik, seperti Inspektorat Kota Cilegon, sangatlah krusial dan memiliki implikasi yang signifikan terhadap kinerja dan efektivitas organisasi.

Organisasi sektor publik memiliki ciri khas dan tantangan yang unik dalam mencapai tujuan mereka, yang membuat perencanaan kinerja menjadi semakin penting dalam mendukung pencapaian visi dan misi mereka. Salah satu alasan utama mengapa perencanaan kinerja sangat penting bagi organisasi publik adalah karena adanya tuntutan akuntabilitas dan transparansi. Menurut (Kadarisman, 2019) sebagai bagian dari pemerintahan yang bertanggung jawab terhadap masyarakat, organisasi publik harus dapat memastikan bahwa keputusan dan kegiatan mereka didasarkan pada tujuan yang jelas dan terukur. Perencanaan kinerja membantu organisasi publik seperti Inspektorat Kota Cilegon untuk menetapkan tujuan yang realistis dan mengukur kemajuan mereka secara objektif, sehingga dapat dipertanggungjawabkan kepada publik dan pemangku kepentingan lainnya.

Organisasi publik juga sering dihadapkan pada tekanan untuk menggunakan sumber daya yang terbatas secara efisien dan efektif. Perencanaan kinerja memungkinkan Inspektorat Kota Cilegon untuk merumuskan strategi yang tepat dalam alokasi dan penggunaan sumber daya yang dimiliki, sehingga dapat mencapai hasil yang optimal dengan biaya yang minimal. Hal ini menjadi semakin penting mengingat kondisi ekonomi yang seringkali mengharuskan organisasi publik untuk melakukan lebih banyak dengan sumber daya yang terbatas. Menurut (marni, 2022) tantangan lain yang dihadapi oleh organisasi publik adalah kompleksitas lingkungan kerja yang seringkali dipenuhi dengan kebijakan publik yang berubah-ubah dan persyaratan regulasi yang ketat. Perencanaan kinerja memungkinkan Inspektorat Kota Cilegon untuk tetap responsif terhadap perubahan lingkungan yang terjadi, dengan merumuskan rencana yang fleksibel dan dapat disesuaikan dengan perubahan kebutuhan dan prioritas organisasi.

Tujuan Visi dan Misi Inspektorat Kota Cilegon menjadi landasan utama dalam menjalankan fungsinya sebagai lembaga pengawasan dan pengendalian aparat sipil negara di tingkat lokal. Visi Inspektorat Kota Cilegon mungkin berfokus pada pencitraan dan penegakan prinsip-prinsip tata kelola yang baik serta peningkatan efisiensi dalam pengelolaan administrasi publik. Sementara itu, misi Inspektorat Kota Cilegon dapat melibatkan berbagai aspek seperti peningkatan transparansi, akuntabilitas, dan pencegahan korupsi dalam semua lini pemerintahan kota. Menurut (Khoiriyah et al., 2020) pentingnya mencapai tujuan-tujuan tersebut sangatlah signifikan, terutama dalam konteks meningkatkan kualitas layanan publik dan membangun kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah.

Dengan adanya visi dan misi yang jelas, Inspektorat Kota Cilegon dapat memberikan arah yang tepat bagi kegiatan pengawasan dan pengendalian aparat sipil negara, yang pada gilirannya dapat meningkatkan efisiensi dan efektivitas dalam pelayanan publik. Kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah akan meningkat ketika mereka melihat upaya nyata dari Inspektorat Kota Cilegon dalam menjalankan visi dan misi mereka, terutama dalam memastikan transparansi, akuntabilitas, dan keadilan dalam semua aspek administrasi public (Tri Saputra et al., 2020). Penjabaran dan pencapaian tujuan visi dan misi Inspektorat Kota Cilegon memiliki implikasi yang besar dalam membentuk citra pemerintah kota yang responsif dan berintegritas di mata masyarakat.

Implementasi perencanaan kinerja memiliki kaitan yang erat dengan pencapaian efisiensi dalam penggunaan sumber daya organisasi, terutama dalam konteks pengawasan dan pengendalian aparat sipil negara seperti yang dilakukan oleh Inspektorat Kota Cilegon. Menurut (Adam et al., 2022) melalui perencanaan kinerja yang terstruktur, organisasi dapat mengidentifikasi dengan jelas sumber daya yang diperlukan untuk mencapai tujuan-tujuan yang telah ditetapkan. Hal ini mencakup alokasi waktu, tenaga, dan anggaran yang optimal untuk setiap kegiatan pengawasan dan pengendalian. Dengan adanya perencanaan kinerja yang baik, Inspektorat Kota Cilegon dapat menghindari pemborosan sumber daya yang tidak perlu dan mengarahkan investasi sumber daya hanya pada aktivitas yang memiliki dampak terbesar dalam mencapai tujuan organisasi. Misalnya, dengan mengidentifikasi prioritas-prioritas dalam perencanaan kinerja,

Inspektorat dapat mengalokasikan sumber daya pada kegiatan pengawasan yang paling penting dan memiliki potensi untuk memberikan hasil yang signifikan. Perencanaan kinerja juga membantu meningkatkan efisiensi melalui pengaturan target-target kinerja yang realistis dan terukur. Menurut (Syarief Hidayatulloh, 2023) dengan memiliki target yang jelas, organisasi dapat mengelola sumber daya dengan lebih efektif dan menghindari pemborosan dalam pelaksanaan kegiatan pengawasan dan pengendalian. Perencanaan kinerja juga memungkinkan Inspektorat Kota Cilegon untuk melakukan pemantauan secara berkala terhadap capaian kinerja, sehingga dapat segera mengidentifikasi dan mengatasi potensi ketidak-efisienan yang muncul selama proses pelaksanaan. Perencanaan kinerja memiliki pengaruh yang signifikan terhadap efektivitas organisasi, terutama dalam konteks pengawasan dan pengendalian aparat sipil negara seperti yang dilakukan oleh Inspektorat Kota Cilegon.

Dalam perencanaan kinerja yang terstruktur, organisasi dapat menetapkan tujuan yang jelas dan terukur, serta merumuskan strategi yang tepat untuk mencapainya. Hal ini memungkinkan Inspektorat Kota Cilegon untuk fokus pada prioritas-prioritas yang penting dan memastikan bahwa sumber daya organisasi dialokasikan dengan efektif sesuai dengan tujuan yang telah ditetapkan. Perencanaan kinerja juga memungkinkan Inspektorat Kota Cilegon untuk melakukan pemantauan dan evaluasi secara berkala terhadap capaian kinerja. Menurut (Gadzali, 2022) dengan adanya

mekanisme evaluasi yang terintegrasi dalam perencanaan kinerja, organisasi dapat mengidentifikasi dengan cepat potensi masalah atau ketidaksesuaian dengan tujuan yang telah ditetapkan, sehingga dapat segera mengambil tindakan perbaikan yang diperlukan.

Hal ini membantu meningkatkan responsivitas dan fleksibilitas organisasi dalam menghadapi perubahan lingkungan atau kondisi yang tidak terduga. Perencanaan kinerja juga memungkinkan Inspektorat Kota Cilegon untuk meningkatkan koordinasi dan integrasi antara berbagai unit dan fungsi di dalam organisasi. Menurut (Hendi et al., 2019) dengan merumuskan tujuan dan strategi secara bersama-sama, serta melakukan komunikasi yang terbuka dan transparan, organisasi dapat menciptakan sinergi antarbagian yang memungkinkan tercapainya efektivitas yang lebih tinggi dalam mencapai tujuan bersama. Aspek akuntabilitas dalam perencanaan kinerja memainkan peran penting dalam memastikan bahwa organisasi, seperti Inspektorat Kota Cilegon, bertanggung jawab secara jelas terhadap masyarakat dan pemangku kepentingan lainnya.

Dalam konteks ini, perencanaan kinerja tidak hanya sekadar alat untuk menetapkan tujuan dan strategi, tetapi juga menjadi mekanisme untuk memastikan bahwa organisasi bertindak secara transparan dan akuntabel dalam semua tahap prosesnya. Menurut penelitian (Khoiriyah et al., 2020) perencanaan kinerja membantu meningkatkan akuntabilitas organisasi dengan menyediakan kerangka kerja yang terstruktur untuk menetapkan tujuan dan target kinerja yang terukur. Dengan adanya tujuan-tujuan yang jelas, organisasi dapat dengan mudah dipantau dan dievaluasi oleh masyarakat dan pemangku kepentingan lainnya untuk melihat apakah mereka telah mencapai hasil yang dijanjikan. Pentingnya transparansi dalam proses perencanaan dan pencapaian tujuan juga tidak bisa diabaikan. Dengan melakukan perencanaan kinerja secara terbuka dan melibatkan partisipasi dari berbagai pihak, Inspektorat Kota Cilegon dapat memastikan bahwa keputusan-keputusan yang diambil didasarkan pada informasi yang akurat dan diperoleh secara adil.

Hal ini membantu membangun kepercayaan masyarakat dan pemangku kepentingan lainnya terhadap integritas dan komitmen organisasi terhadap pencapaian tujuan bersama. Hasil penelitian (Adam et al., 2022) menyatakan bahwa transparansi dalam pencapaian tujuan juga membuka ruang bagi umpan balik yang konstruktif dari masyarakat dan pemangku kepentingan lainnya. Dengan mendengarkan dan merespons masukan-masukan tersebut, Inspektorat Kota Cilegon dapat terus melakukan perbaikan dan penyesuaian dalam perencanaan dan pelaksanaan kegiatan, sehingga dapat mencapai hasil yang lebih baik secara keseluruhan. Inspektorat Kota Cilegon memiliki peran penting dalam menjalankan fungsi pengawasan dan pengendalian terhadap aparat sipil negara di tingkat lokal.

Sebagai lembaga pemerintah yang bertanggung jawab langsung kepada walikota, Inspektorat Kota Cilegon memiliki mandat untuk memastikan bahwa kebijakan dan prosedur yang ditetapkan oleh pemerintah kota dijalankan secara efektif, efisien, dan sesuai dengan ketentuan hukum yang

berlaku. Sebagai bagian dari tugasnya, Inspektorat Kota Cilegon melakukan berbagai kegiatan pengawasan, audit, dan evaluasi terhadap kinerja unit-unit organisasi di lingkungan pemerintah kota. Menurut (Wongkar et al., 2021) hal ini meliputi pengawasan terhadap pengelolaan keuangan, pengadaan barang dan jasa, serta ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan. Inspektorat juga berperan dalam memberikan rekomendasi dan saran kepada pimpinan organisasi untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas dalam pengelolaan administrasi publik.

Perencanaan kinerja memiliki potensi besar untuk memberikan kontribusi yang signifikan dalam meningkatkan kinerja organisasi Inspektorat Kota Cilegon. Dengan merumuskan tujuan dan strategi yang jelas melalui perencanaan kinerja, Inspektorat dapat mengarahkan upaya pengawasan dan pengendalian mereka secara lebih terfokus dan terarah. Dengan melakukan pemantauan dan evaluasi secara berkala terhadap capaian kinerja, Inspektorat dapat mengidentifikasi area-area yang memerlukan perbaikan dan melakukan penyesuaian strategi sesuai dengan kebutuhan yang ada (Hendi et al., 2019). Perencanaan kinerja memiliki potensi besar untuk menjadi instrumen yang efektif dalam meningkatkan kinerja Inspektorat Kota Cilegon dalam menjalankan fungsi pengawasan dan pengendalian aparat sipil negara di tingkat lokal. Dengan memanfaatkan perencanaan kinerja secara optimal, Inspektorat dapat memastikan bahwa sumber daya yang dimiliki digunakan secara efektif dan hasil kerja yang dihasilkan dapat memberikan manfaat yang maksimal bagi pemerintah kota dan masyarakatnya.

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui kinerja diimplementasikan sebagai instrumen strategis dalam mencapai visi dan misi Inspektorat Kota Cilegon dan untuk mengetahui implementasi perencanaan strategis pembinaan dan pengawasan inspektorat kota cilegon terhadap organisasi perangkat daerah (OPD) serta mengetahui perencanaan kinerja dalam meningkatkan pembinaan dan pengawasan inspektorat kota cilegon.

METHOD

Dalam penelitian dengan judul "Pengaruh Implementasi Perencanaan Strategis Pembinaan dan Pengawasan Inspektorat Kota Cilegon dalam Mewujudkan Visi dan Misi Pemerintah Kota Cilegon", metode penelitian kuantitatif menjadi pendekatan yang sangat relevan dan diperlukan. Metode ini memungkinkan peneliti untuk mengukur secara numerik pengaruh dari implementasi perencanaan strategis Inspektorat Kota Cilegon terhadap pencapaian visi dan misi Pemerintah Kota Cilegon. Penelitian kuantitatif ini melibatkan pengumpulan data melalui survei atau kuesioner yang dirancang secara khusus untuk mengevaluasi persepsi dan pendapat responden terhadap implementasi perencanaan strategis Inspektorat. Data yang terkumpul kemudian dianalisis menggunakan teknik statistik untuk mengidentifikasi hubungan antara variabel-variabel yang diteliti, seperti sejauh mana implementasi perencanaan strategis Inspektorat berkontribusi terhadap pencapaian visi dan misi Pemerintah Kota Cilegon.

Penelitian kuantitatif menggunakan analisis data sekunder, seperti data kinerja atau laporan evaluasi yang dikeluarkan oleh Inspektorat Kota Cilegon dan Pemerintah Kota Cilegon. Data-data tersebut dapat digunakan untuk menilai pencapaian tujuan-tujuan strategis yang telah ditetapkan oleh pemerintah dan sejauh mana implementasi perencanaan strategis Inspektorat telah berkontribusi dalam pencapaian tersebut. Dengan menggunakan metode penelitian kuantitatif, peneliti dapat memberikan bukti empiris yang kuat tentang pengaruh implementasi perencanaan strategis Inspektorat terhadap mewujudkan visi dan misi Pemerintah Kota Cilegon.

RESULTS AND DISCUSSION

Uji t (Uji Parsial)

Uji t dalam penelitian ini digunakan untuk melihat ada atau tidak adanya pengaruh variabel bebas terhadap variabel terikat secara parsial melalui bantuan *SPSS. 25 for windows*. Hasil uji t dapat dilihat dalam tabel di bawah ini :

Tabel Hasil Uji t (Parsial)

Coefficients ^a						
Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
		B	Std. Error	Beta		
1	(Constant)	2.240	1.689		1.327	.196
	X1	.073	.201	.107	.364	.719
	X2	.531	.207	.750	2.562	.017
a. Dependent Variable: Y						

a. Pengaruh Independen (X₁) terhadap Pemanfaatan hasil laporan (Y)

H_0 = tidak terdapat pengaruh positif Independen (X₁) terhadap Pemanfaatan hasil laporan (Y)

H_1 = terdapat pengaruh positif Independen (X₁) terhadap Pemanfaatan hasil laporan (Y)

Berdasarkan tabel di atas, dapat dilihat bahwa nilai *Sig.* Untuk variabel Independen (X₁) sebesar 0,719 dan besarnya t_{hitung} yaitu 0,364 sedangkan besarnya t_{tabel} yaitu 1,994 Pada penelitian ini $t_{hitung} (0,364) > t_{tabel} (1,994)$ dan *Sig.* (0,719) < 0,05, maka dapat disimpulkan bahwa H_0 diterima yang artinya variabel Independen tidak berpengaruh positif terhadap variabel Pemanfaatan hasil laporan (Y)

b. Pengaruh Integritas (X₂) terhadap Pemanfaatan hasil laporan (Y)

H_0 = tidak terdapat pengaruh positif Integritas (X₂) terhadap Pemanfaatan hasil laporan

H_1 = terdapat pengaruh positif Integritas (X₂) terhadap Pemanfaatan hasil laporan (Y)

Berdasarkan tabel di atas, dapat dilihat bahwa nilai *Sig.* Untuk variabel Integritas (X₂) sebesar 0,017 dan besarnya t_{hitung} yaitu 2.562 sedangkan besarnya t_{tabel} 1,994. Pada penelitian ini $t_{hitung} (2.562) > t_{tabel} (1,994)$ dan *Sig.* (0,17) < 0,05 maka dapat disimpulkan H_1 diterima yang

artinya bahwa variabel Integritas (X_2) berpengaruh positif terhadap variabel Pemanfaatan hasil laporan (Y).

1. Perencanaan kinerja diimplementasikan sebagai instrumen strategis dalam mencapai visi dan misi Inspektorat Kota Cilegon

Penetapan visi dan misi Inspektorat Kota Cilegon, langkah pertama adalah merumuskan dan menjabarkan dengan jelas visi dan misi organisasi. Visi merupakan gambaran tentang arah yang diinginkan oleh Inspektorat Kota Cilegon di masa depan, mencerminkan tujuan akhir yang ingin dicapai. Sementara itu, misi menjelaskan peran, fungsi, serta tanggung jawab institusi dalam mencapai visi tersebut. Visi Inspektorat Kota Cilegon dapat mencakup aspirasi untuk menjadi lembaga pengawasan yang unggul, transparan, dan terpercaya dalam mendukung penyelenggaraan pemerintahan yang bersih dan efektif. Sementara itu, misinya mungkin mencakup komitmen untuk melaksanakan fungsi pengawasan dengan profesionalisme dan integritas, memberikan rekomendasi yang konstruktif untuk perbaikan, serta meningkatkan akuntabilitas dan kinerja institusi pemerintah daerah.

Penjabaran visi dan misi ini tidak hanya memberikan arah yang jelas bagi Inspektorat Kota Cilegon, tetapi juga menjadi dasar bagi perumusan tujuan strategis dan perencanaan kinerja yang lebih spesifik. Dengan memiliki visi dan misi yang kuat, Inspektorat Kota Cilegon dapat memotivasi seluruh anggota organisasi untuk bekerja menuju pencapaian tujuan-tujuan strategis yang telah ditetapkan, serta memperkuat identitas dan citra institusi di mata masyarakat. Setelah penjabaran visi dan misi Inspektorat Kota Cilegon, pembahasan dilanjutkan dengan menjabarkan tujuan strategis yang menjadi langkah-langkah konkret dalam pencapaian visi dan misi tersebut. Tujuan strategis ini dirancang untuk mencakup berbagai aspek kinerja institusi, dengan fokus pada peningkatan efisiensi, efektivitas, akuntabilitas, dan transparansi dalam penyelenggaraan pemerintahan.

Tujuan strategis dapat mencakup berbagai bidang kerja, seperti peningkatan kualitas pelayanan kepada masyarakat, pengembangan kapasitas dan kompetensi pegawai, peningkatan pengawasan dan kontrol atas pengelolaan keuangan dan aset daerah, serta penguatan mekanisme pelaporan dan pertanggungjawaban kinerja. Pentingnya menetapkan tujuan strategis yang terukur dan terarah adalah untuk memberikan fokus yang jelas bagi Inspektorat Kota Cilegon dalam mengarahkan upaya-upaya mereka menuju pencapaian visi dan misi. Dengan memiliki tujuan strategis yang jelas dan terukur, Inspektorat dapat memprioritaskan program-program dan kegiatan yang tepat untuk meningkatkan kinerja organisasi dan memberikan manfaat yang maksimal bagi masyarakat. Selain itu, tujuan strategis yang jelas juga memungkinkan untuk melakukan evaluasi secara berkala terhadap

pencapaian kinerja, sehingga memungkinkan adanya penyesuaian dan perbaikan yang diperlukan untuk mencapai visi dan misi yang telah ditetapkan (Arifin & Takrim, 2021).

Setelah penetapan tujuan strategis, langkah selanjutnya dalam perencanaan kinerja adalah melakukan pemetaan kinerja. Proses ini melibatkan pengidentifikasian indikator kinerja kunci (Key Performance Indicators/KPIs) yang terkait dengan setiap tujuan strategis yang telah ditetapkan. Indikator kinerja ini berfungsi sebagai alat pengukuran yang digunakan untuk mengevaluasi pencapaian dan perkembangan institusi dalam mencapai tujuan-tujuan strategisnya. Pemetaan kinerja yang tepat memungkinkan Inspektorat Kota Cilegon untuk memiliki pemahaman yang lebih baik tentang kemajuan yang telah dicapai dalam mencapai tujuan-tujuan strategisnya. Indikator kinerja yang dipilih harus relevan, terukur, dapat diukur secara objektif, dan berkaitan langsung dengan tujuan strategis yang telah ditetapkan (Aslam, 2022). Misalnya, untuk tujuan strategis terkait dengan peningkatan efisiensi operasional, indikator kinerja seperti rasio biaya terhadap pendapatan atau jumlah waktu yang diperlukan untuk menyelesaikan suatu tugas dapat diidentifikasi dan dimonitor secara berkala.

Selain itu, pemetaan kinerja juga memungkinkan Inspektorat Kota Cilegon untuk mengidentifikasi area-area di mana perbaikan atau penyesuaian mungkin diperlukan. Dengan melacak dan mengevaluasi indikator kinerja secara teratur, institusi dapat mengidentifikasi tantangan atau hambatan yang mungkin timbul dalam mencapai tujuan-tujuan strategisnya, serta mengambil tindakan yang sesuai untuk mengatasi masalah tersebut (Rambu Ana & Ga, 2021). Dalam tahap perencanaan kinerja, tidak hanya cukup dengan menetapkan tujuan strategis dan indikator kinerja, tetapi juga diperlukan langkah-langkah konkret yang dapat dilaksanakan untuk mencapai tujuan tersebut. Pembahasan juga mencakup perumusan perencanaan tindakan atau langkah-langkah konkret yang akan diambil untuk mencapai setiap tujuan strategis dan memenuhi indikator kinerja yang telah ditetapkan.

Langkah-langkah ini harus memenuhi prinsip-prinsip SMART, yaitu spesifik (specific), terukur (measurable), dapat dicapai (achievable), relevan (relevant), dan berbatasan waktu (time-bound). Artinya, setiap langkah tindakan harus dirumuskan secara jelas dan spesifik, dengan target yang dapat diukur untuk mengevaluasi kemajuannya. Selain itu, langkah-langkah tersebut juga harus mempertimbangkan ketersediaan sumber daya dan kemungkinan untuk dicapai dalam konteks situasi dan kondisi yang ada. Misalnya, jika tujuan strategisnya adalah untuk meningkatkan akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan, maka langkah-langkah tindakan mungkin termasuk penyusunan panduan atau prosedur yang jelas untuk pengelolaan keuangan, pelatihan bagi pegawai terkait tentang prinsip-prinsip akuntabilitas, penerapan sistem pemantauan dan evaluasi yang teratur, dan sebagainya (Arifin & Takrim, 2021). Setiap langkah tindakan harus memiliki target yang dapat diukur, seperti jadwal pelaksanaan atau tingkat kepatuhan terhadap prosedur yang telah ditetapkan.

Dengan perumusan perencanaan tindakan yang sesuai dengan prinsip SMART, Inspektorat Kota Cilegon dapat memastikan bahwa upaya-upaya yang dilakukan memiliki arah yang jelas, terukur, dan dapat diukur, sehingga memungkinkan evaluasi kemajuan secara efektif dan pengambilan tindakan korektif jika diperlukan. Langkah-langkah tindakan yang terencana dengan baik juga dapat meningkatkan efisiensi dan efektivitas dalam pencapaian tujuan strategis dan pengelolaan kinerja institusi secara keseluruhan (Arif et al., 2023). Dalam tahap akhir perencanaan kinerja, penting untuk membahas strategi monitoring dan evaluasi sebagai bagian integral dari proses manajemen kinerja. Monitoring dan evaluasi dilakukan secara berkala untuk memastikan bahwa institusi mencapai tujuan-tujuan strategis yang telah ditetapkan dengan efektif. Proses ini melibatkan pemantauan pencapaian indikator kinerja yang telah ditetapkan, identifikasi masalah atau hambatan yang mungkin muncul dalam pencapaian tujuan, serta pengambilan tindakan korektif yang diperlukan.

Pemantauan dilakukan secara berkala untuk memantau kemajuan dalam pencapaian tujuan-tujuan strategis. Ini melibatkan pengumpulan data dan informasi terkait kinerja institusi, seperti hasil kegiatan, ketersediaan sumber daya, dan lainnya. Pencapaian indikator kinerja dipantau untuk melihat apakah institusi berada di jalur yang tepat menuju pencapaian tujuan strategisnya. Selain itu, evaluasi dilakukan untuk mengevaluasi efektivitas strategi dan langkah-langkah tindakan yang telah diambil. Evaluasi melibatkan analisis mendalam terhadap pencapaian tujuan strategis, mengidentifikasi faktor-faktor yang mendukung atau menghambat, serta mengevaluasi dampak dari langkah-langkah yang telah dilaksanakan. Hasil evaluasi ini membantu dalam mengidentifikasi kekuatan dan kelemahan dalam perencanaan dan pelaksanaan kinerja, serta menyediakan wawasan yang berharga untuk perbaikan di masa depan.

Jika selama proses monitoring dan evaluasi teridentifikasi masalah atau hambatan yang menghalangi pencapaian tujuan, maka langkah-langkah korektif harus segera diambil. Hal ini bisa berupa penyesuaian rencana tindakan, realokasi sumber daya, atau perubahan strategi yang diperlukan. Tindakan korektif ini penting untuk memastikan bahwa institusi tetap berada di jalur yang tepat menuju pencapaian visi, misi, dan tujuan strategisnya. Dengan melakukan monitoring dan evaluasi secara teratur, Inspektorat Kota Cilegon dapat memastikan bahwa perencanaan kinerja yang telah dibuat dapat diimplementasikan secara efektif dan efisien. Proses ini juga memungkinkan institusi untuk memperbaiki kinerjanya, menghadapi tantangan yang muncul, dan mencapai hasil yang optimal sesuai dengan visi dan misi yang telah ditetapkan.

2. Dampak implementasi perencanaan strategis pembinaan dan pengawasan inspektorat kota cilegon terhadap organisasi perangkat daerah (OPD)

Implementasi perencanaan strategis oleh Inspektorat Kota Cilegon memiliki dampak yang signifikan terhadap peningkatan kinerja Organisasi Perangkat Daerah (OPD). Salah satu dampak utama adalah peningkatan kualitas pelayanan yang diberikan oleh OPD kepada masyarakat. Dengan adanya pembinaan dan pengawasan yang efektif dari Inspektorat, OPD diarahkan untuk meningkatkan standar pelayanan mereka, termasuk responsif terhadap kebutuhan masyarakat, kejelasan dalam prosedur layanan, dan kesesuaian antara harapan masyarakat dengan kinerja OPD. Perencanaan strategis Inspektorat juga berkontribusi pada peningkatan efisiensi dalam pengelolaan anggaran oleh OPD. Melalui pengawasan yang ketat terhadap pengelolaan keuangan, Inspektorat membantu OPD untuk mengidentifikasi potensi pemborosan atau penyimpangan dalam penggunaan anggaran, sehingga memungkinkan mereka untuk mengalokasikan sumber daya secara lebih efektif dan efisien untuk memenuhi kebutuhan masyarakat.

Tidak hanya itu, implementasi perencanaan strategis Inspektorat juga memperkuat akuntabilitas dan transparansi dalam penyelenggaraan tugas dan fungsi OPD. Dengan menetapkan standar yang jelas dan memantau kinerja OPD secara teratur, Inspektorat membantu memastikan bahwa setiap keputusan dan tindakan OPD dapat dipertanggungjawabkan secara publik. Hal ini meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah daerah dan mengurangi risiko korupsi serta penyalahgunaan kekuasaan. Secara keseluruhan, perencanaan strategis Inspektorat Kota Cilegon berpotensi untuk merangsang perbaikan signifikan dalam kinerja OPD (Utomo et al., 2021). Dengan mengarahkan fokus pada peningkatan kualitas pelayanan, efisiensi pengelolaan anggaran, serta akuntabilitas dan transparansi dalam penyelenggaraan tugas dan fungsi mereka, Inspektorat dapat menjadi agen perubahan yang efektif dalam mendorong terciptanya pemerintahan yang lebih baik dan pelayanan yang lebih baik bagi masyarakat.

Pembinaan dan pengawasan yang dilakukan oleh Inspektorat Kota Cilegon memiliki peran penting dalam memastikan bahwa Organisasi Perangkat Daerah (OPD) mematuhi peraturan dan prosedur yang berlaku. Dengan adanya pengawasan yang ketat, Inspektorat dapat membantu OPD untuk memahami, menerapkan, dan mematuhi ketentuan-ketentuan hukum dan regulasi yang berlaku dalam pelaksanaan tugas dan fungsi mereka. Salah satu manfaat utama dari peningkatan kepatuhan terhadap peraturan dan prosedur adalah mengurangi risiko terjadinya pelanggaran atau penyimpangan dalam pengelolaan keuangan, pengadaan barang/jasa, dan pelaksanaan program kerja oleh OPD. Dengan memastikan bahwa setiap langkah yang diambil oleh OPD sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku, Inspektorat dapat membantu menghindari potensi masalah hukum, sanksi, atau konsekuensi negatif lainnya yang dapat timbul akibat pelanggaran atau penyimpangan tersebut (kementerian keuangan, 2022).

Peningkatan kepatuhan juga membantu meningkatkan efektivitas dan efisiensi operasional OPD. Dengan mematuhi prosedur yang telah ditetapkan, OPD dapat menghindari pemborosan waktu, sumber daya, dan energi yang mungkin terjadi akibat pelaksanaan yang tidak sesuai dengan aturan. Hal ini juga dapat meningkatkan kualitas pengelolaan keuangan, pengadaan barang/jasa, dan pelaksanaan program kerja secara keseluruhan. Dengan demikian, pembinaan dan pengawasan yang dilakukan oleh Inspektorat Kota Cilegon tidak hanya bertujuan untuk menegakkan aturan, tetapi juga untuk meningkatkan kualitas dan keefektifan kinerja OPD secara keseluruhan. Dengan memastikan kepatuhan terhadap peraturan dan prosedur yang berlaku, Inspektorat dapat menjadi mitra yang berharga bagi OPD dalam mencapai tujuan-tujuan strategisnya, serta menjaga integritas dan reputasi pemerintah daerah di mata masyarakat. Implementasi perencanaan strategis oleh Inspektorat Kota Cilegon berpotensi memperkuat sistem pengendalian internal di Organisasi Perangkat Daerah (OPD) (Yanti, 2020). Melalui pembinaan dan pengawasan yang cermat, Inspektorat tidak hanya menilai kinerja OPD, tetapi juga memberikan rekomendasi dan saran yang konstruktif untuk memperbaiki proses-proses internal yang ada.

Salah satu dampak utama dari penguatan sistem pengendalian internal adalah kemampuan OPD dalam mengidentifikasi dan mengatasi risiko yang ada. Inspektorat membantu OPD dalam mengidentifikasi titik-titik lemah dalam sistem pengendalian internal mereka, seperti ketidakcocokan antara prosedur yang ditetapkan dan pelaksanaannya, kelemahan dalam pemisahan tugas, atau kekurangan dalam pemantauan dan evaluasi kinerja. Dengan menyoroti masalah-masalah ini, OPD dapat mengambil langkah-langkah perbaikan yang diperlukan untuk mengurangi risiko kegagalan atau penyimpangan dalam pelaksanaan tugas dan fungsi mereka. Inspektorat juga membantu OPD dalam mengimplementasikan tindakan pencegahan yang diperlukan untuk mengurangi risiko tersebut. Hal ini dapat meliputi penyusunan ulang prosedur-prosedur internal, peningkatan pemantauan dan evaluasi kinerja, pelatihan staf, atau penerapan teknologi informasi yang lebih canggih untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas sistem pengendalian internal.

Dengan memperkuat sistem pengendalian internal, OPD dapat meningkatkan kinerja dan akuntabilitas mereka, serta mengurangi risiko kerugian, penyalahgunaan kekuasaan, atau pelanggaran hukum. Secara keseluruhan, penguatan sistem pengendalian internal oleh Inspektorat tidak hanya membantu melindungi kepentingan dan aset pemerintah daerah, tetapi juga mendukung terciptanya tata kelola yang baik dan pelayanan publik yang berkualitas bagi masyarakat. Implementasi perencanaan strategis oleh Inspektorat Kota Cilegon membawa dampak signifikan terhadap peningkatan akuntabilitas dan transparansi dalam pengelolaan dan pelaporan kinerja Organisasi Perangkat Daerah (OPD). Melalui pengawasan yang cermat dan evaluasi terhadap kinerja OPD, Inspektorat bertujuan untuk mendorong OPD agar lebih

terbuka dan bertanggung jawab dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawab mereka kepada publik (Kusmayadi & Kaihatu, 2017).

Salah satu dampak utama dari peningkatan akuntabilitas adalah peningkatan kualitas pelaporan kinerja OPD. Dengan adanya pengawasan yang ketat dari Inspektorat, OPD diharapkan untuk menyusun laporan kinerja yang lebih akurat, lengkap, dan terpercaya. Hal ini memungkinkan publik untuk mendapatkan informasi yang jelas dan transparan tentang capaian kinerja dan penggunaan anggaran oleh OPD. Peningkatan transparansi juga mencakup keterbukaan OPD dalam menyampaikan informasi kepada publik tentang kegiatan, keputusan, dan kebijakan yang mereka lakukan. Dengan demikian, masyarakat dapat lebih mudah memantau dan mengevaluasi kinerja OPD, serta berpartisipasi dalam proses pengambilan keputusan yang berkaitan dengan penyelenggaraan pemerintahan daerah.

Dengan meningkatnya akuntabilitas dan transparansi, diharapkan dapat tercipta hubungan yang lebih baik antara pemerintah daerah dan masyarakat. Keterbukaan dalam pelaporan kinerja dan pengelolaan anggaran, serta kemauan untuk menerima tanggung jawab atas tindakan dan keputusan yang diambil, merupakan langkah penting dalam memperkuat kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah daerah (Mukmin, 2020). Implementasi perencanaan strategis yang dilakukan oleh Inspektorat Kota Cilegon memiliki dampak yang positif terhadap peningkatan kepuasan masyarakat terhadap layanan yang diberikan oleh Organisasi Perangkat Daerah (OPD). Melalui pembinaan dan pengawasan yang efektif, Inspektorat bertujuan untuk meningkatkan kualitas pelayanan, transparansi, dan akuntabilitas OPD, sehingga diharapkan dapat meningkatkan kepercayaan dan kepuasan masyarakat terhadap pemerintah daerah.

Salah satu dampak utama dari peningkatan kualitas pelayanan adalah masyarakat akan mendapatkan layanan yang lebih baik dan responsif terhadap kebutuhan mereka. Dengan adanya pembinaan dan pengawasan yang dilakukan oleh Inspektorat, OPD diharapkan untuk meningkatkan standar pelayanan mereka, termasuk waktu tanggapan, kualitas informasi yang disampaikan, dan kesesuaian antara harapan masyarakat dengan kinerja OPD. Transparansi dan akuntabilitas yang ditingkatkan juga dapat meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah daerah. Dengan memberikan akses yang lebih luas terhadap informasi tentang kegiatan dan pengelolaan anggaran OPD, serta menerima tanggung jawab atas tindakan dan keputusan yang diambil, pemerintah daerah dapat membangun hubungan yang lebih baik dengan masyarakat dan meningkatkan tingkat kepercayaan mereka (Mustafa, 2021).

Dengan meningkatnya kepercayaan dan kepuasan masyarakat, diharapkan akan tercipta lingkungan yang lebih harmonis antara pemerintah daerah dan masyarakat. Hal ini tidak hanya akan memperkuat legitimasi pemerintah daerah, tetapi juga akan meningkatkan partisipasi

masyarakat dalam proses pengambilan keputusan yang berdampak pada penyelenggaraan pelayanan publik. Secara keseluruhan, peningkatan kualitas pelayanan, transparansi, dan akuntabilitas yang dihasilkan dari implementasi perencanaan strategis Inspektorat dapat memberikan kontribusi yang signifikan terhadap peningkatan kepuasan masyarakat terhadap layanan yang diberikan oleh pemerintah daerah.

3. Peran perencanaan kinerja dalam meningkatkan efektivitas pengawasan dan pengendalian aparat sipil negara serta meningkatkan tingkat akuntabilitas di Inspektorat Kota Cilegon

Dalam konteks Inspektorat Kota Cilegon, pengembangan standar kinerja merupakan langkah krusial dalam perencanaan kinerja yang bertujuan untuk meningkatkan efektivitas pengawasan dan pengendalian terhadap aparat sipil negara. Standar kinerja yang jelas dan terukur membantu menciptakan kerangka kerja yang komprehensif untuk menilai dan mengawasi kinerja aparat sipil negara secara objektif. Dengan adanya standar kinerja ini, Inspektorat dapat mengukur pencapaian dan kualitas kinerja aparat sipil negara sesuai dengan parameter yang telah ditetapkan. Standar kinerja juga memberikan pedoman yang jelas bagi aparat sipil negara dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawab mereka. Dengan menetapkan harapan kinerja yang spesifik, standar kinerja membantu mengarahkan upaya-upaya aparat sipil negara menuju pencapaian hasil yang diinginkan dan meningkatkan akuntabilitas individu-individu tersebut atas kinerja mereka (Intan Permatasari, 2018).

Standar kinerja yang terukur memfasilitasi proses evaluasi kinerja yang objektif dan berkelanjutan. Inspektorat dapat menggunakan standar kinerja ini sebagai dasar untuk mengevaluasi kinerja aparat sipil negara secara berkala dan menyeluruh. Dengan demikian, evaluasi kinerja menjadi lebih sistematis dan dapat mendukung pengambilan keputusan yang lebih tepat dalam rangka meningkatkan efektivitas dan efisiensi penyelenggaraan pelayanan publik (Arif et al., 2023). Pemantauan dan evaluasi yang teratur merupakan bagian integral dari perencanaan kinerja Inspektorat Kota Cilegon dalam meningkatkan efektivitas pengawasan dan pengendalian aparat sipil negara. Dengan adanya perencanaan kinerja yang telah disusun dengan baik, Inspektorat dapat melakukan pemantauan terhadap kinerja aparat sipil negara dengan menggunakan indikator kinerja yang telah ditetapkan sebelumnya.

Indikator kinerja yang terukur memungkinkan Inspektorat untuk mengevaluasi pencapaian hasil dan membandingkannya dengan target yang telah ditetapkan. Dengan demikian, pemantauan dan evaluasi menjadi alat yang efektif untuk mengidentifikasi area-area di mana kinerja aparat sipil negara perlu ditingkatkan atau diperbaiki yang diperlukan. Melalui proses pemantauan dan evaluasi yang berkala, Inspektorat dapat mengidentifikasi tren kinerja dan pola-pola yang muncul dari waktu ke waktu. Hal ini membantu Inspektorat untuk

membuat keputusan yang lebih tepat dalam merumuskan rekomendasi dan strategi untuk meningkatkan kinerja aparat sipil negara secara keseluruhan.

Pemantauan dan evaluasi yang sistematis juga memungkinkan Inspektorat untuk memberikan umpan balik yang konstruktif kepada aparat sipil negara. Dengan memberikan informasi yang jelas tentang kinerja mereka, Inspektorat dapat membantu aparat sipil negara untuk memahami kekuatan dan kelemahan mereka, serta mengidentifikasi area-area di mana mereka dapat melakukan perbaikan. Pengidentifikasian risiko membantu Inspektorat untuk mengantisipasi dan mengelola potensi ancaman yang dapat mengganggu pencapaian tujuan organisasi. Risiko-risiko tersebut dapat berasal dari berbagai faktor, seperti kebijakan yang tidak sesuai, ketidakpatuhan terhadap regulasi, kelemahan dalam sistem pengendalian internal, atau perubahan lingkungan eksternal. Dengan mengidentifikasi risiko-risiko ini, Inspektorat dapat mengambil langkah-langkah pencegahan dan mitigasi yang tepat untuk mengurangi dampak negatifnya terhadap kinerja organisasi.

Di sisi lain, pengidentifikasian peluang memungkinkan Inspektorat untuk mengidentifikasi area-area di mana kinerja organisasi dapat ditingkatkan atau perbaikan yang dapat dilakukan. Peluang tersebut dapat berasal dari perubahan dalam kebijakan atau regulasi yang mendukung, kemajuan dalam teknologi informasi, atau praktik-praktik terbaik dalam pengelolaan sumber daya manusia. Dengan mengenali peluang-peluang ini, Inspektorat dapat mengembangkan strategi-strategi inovatif untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi dalam pelaksanaan tugas dan tanggung jawab aparat sipil negara (Intan Permatasari, 2018). Penyusunan rencana tindakan korektif dimulai dengan identifikasi akar permasalahan yang menyebabkan ketidaksesuaian atau pelanggaran tersebut. Inspektorat perlu melakukan analisis mendalam untuk memahami faktor-faktor yang berkontribusi terhadap terjadinya masalah, baik itu berkaitan dengan kebijakan, prosedur, sistem pengendalian internal, atau perilaku individu.

Setelah akar permasalahan teridentifikasi, Inspektorat dapat menyusun rencana tindakan yang terperinci dan terarah untuk mengatasi masalah tersebut. Rencana tindakan ini harus mencakup langkah-langkah konkret yang perlu dilakukan, siapa yang bertanggung jawab untuk melaksanakan setiap langkah, jadwal pelaksanaan, serta indikator pencapaian yang jelas. Rencana tindakan korektif juga perlu memperhitungkan aspek-aspek seperti sumber daya yang diperlukan, risiko yang terkait dengan implementasi rencana, serta potensi dampaknya terhadap kinerja organisasi secara keseluruhan. Inspektorat perlu memastikan bahwa rencana tindakan yang disusun dapat dilaksanakan secara efektif dan efisien, serta menghasilkan perbaikan yang berkelanjutan dalam kinerja aparat sipil negara. Pengembangan budaya akuntabilitas merupakan salah satu tujuan utama dari perencanaan kinerja yang dilakukan oleh Inspektorat Kota Cilegon. Dengan menyusun perencanaan yang transparan dan

terukur, Inspektorat membantu menciptakan lingkungan di mana aparat sipil negara merasa bertanggung jawab dan akuntabel atas tugas dan tanggung jawab mereka.

Dalam perencanaan kinerja, Inspektorat menetapkan target kinerja yang jelas dan terukur untuk setiap unit atau individu di dalam organisasi. Target ini mencakup berbagai aspek kinerja, seperti kualitas layanan, efisiensi penggunaan sumber daya, kepatuhan terhadap kebijakan dan regulasi, serta pencapaian tujuan organisasi secara keseluruhan. Dengan adanya target-target ini, aparat sipil negara memiliki arahan yang jelas mengenai apa yang diharapkan dari mereka dan bagaimana mereka akan dievaluasi. Selain menetapkan target kinerja, Inspektorat juga melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap pencapaian target tersebut secara rutin. Dengan melakukan pemantauan yang berkelanjutan, Inspektorat memastikan bahwa aparat sipil negara tetap fokus dan berkomitmen untuk mencapai target yang telah ditetapkan. Selain itu, evaluasi kinerja juga memberikan umpan balik yang penting bagi aparat sipil negara untuk memahami sejauh mana mereka telah mencapai target-target tersebut dan di mana mereka dapat melakukan perbaikan.

Melalui proses ini, Inspektorat membantu membangun budaya di mana akuntabilitas dianggap sebagai nilai inti yang harus diterapkan oleh semua aparat sipil negara. Dengan menempatkan akuntabilitas sebagai fokus utama, Inspektorat memastikan bahwa aparat sipil negara merasa bertanggung jawab atas tugas dan tanggung jawab mereka, dan bahwa mereka siap untuk menerima konsekuensi dari kinerja mereka. Dengan demikian, pengembangan budaya akuntabilitas menjadi salah satu hasil yang diharapkan dari perencanaan kinerja yang dilakukan oleh Inspektorat Kota Cilegon

CONCLUSION

Implementasi perencanaan strategis serta peran Inspektorat Kota Cilegon dalam pembinaan dan pengawasan memiliki dampak yang signifikan dalam mewujudkan visi dan misi pemerintah Kota Cilegon. Dengan memiliki tugas membantu walikota dalam mengawasi dan membina pelaksanaan urusan pemerintah daerah, Inspektorat menjadi komponen penting dalam menjamin efektivitas dan efisiensi pelaksanaan program dan kegiatan pemerintah. Selain itu, keberhasilan dalam mencapai tujuan dan sasaran juga sangat tergantung pada perencanaan kinerja yang sistematis, yang membantu organisasi untuk merumuskan strategi yang tepat serta memastikan koordinasi dan integrasi yang baik dalam aktivitas organisasi. Analisis regresi berganda juga menunjukkan adanya pengaruh variabel independen dan integritas terhadap pemanfaatan laporan hasil pengawasan, yang mengindikasikan pentingnya faktor-faktor tersebut dalam mencapai efektivitas pengawasan. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa penelitian ini memberikan kontribusi penting dalam meningkatkan tata kelola pemerintahan yang baik dan efektif di Kota

Cilegon, dengan menyoroti pentingnya implementasi perencanaan strategis dan peran Inspektorat dalam pembinaan dan pengawasan untuk mencapai visi dan misi pemerintah kota.

Dengan demikian, Inspektorat dapat lebih efektif dalam mengawasi pelaksanaan program pemerintah serta memberikan kontribusi yang lebih besar dalam mencapai tujuan pembangunan Kota Cilegon secara keseluruhan.

1. Peningkatan Pelatihan dan Pengembangan Pegawai

Inspektorat perlu meningkatkan program pelatihan dan pengembangan untuk pegawainya agar memiliki keterampilan yang lebih baik dalam melaksanakan tugas pembinaan dan pengawasan. Pelatihan dapat mencakup penggunaan teknologi informasi, analisis data, dan komunikasi efektif, sehingga pegawai dapat lebih efisien dan efektif dalam melakukan tugas-tugasnya.

2. Penguatan Kolaborasi dengan Pihak Terkait

Inspektorat harus memperkuat kerjasama dengan pihak terkait, termasuk APIP dan unit-unit pemerintah lainnya, untuk meningkatkan sinergi dalam pelaksanaan pembinaan dan pengawasan. Kolaborasi yang baik akan memperkuat pengawasan serta memungkinkan pertukaran informasi dan sumber daya yang lebih efisien.

3. Optimalisasi Penggunaan Data dan Teknologi

Inspektorat perlu lebih memanfaatkan teknologi informasi dan data dalam melakukan pengawasan. Penggunaan sistem informasi manajemen yang canggih dan analisis data yang mendalam dapat membantu Inspektorat mengidentifikasi potensi risiko dan melakukan pengawasan yang lebih proaktif dan terarah.

ACKNOWLEDGMENTS

Kami mengucapkan terimakasih kepada Inspektorat Kota Cilegon yang telah bersedia menjadi objek penelitian kami dan telah membantu kami dalam pemenuhan data-data dalam melakukan penelitian. Selain itu kami pun berterimakasih kepada dosen Ibu Liza Mumtazah Darmawulan, SE, M.Si yang telah mendampingi dan mereviu jurnal ini guna menghasilkan kesempurnaan dalam artikel ini.

REFERENCES

- Adam, Sjarlis, S., & Oktaviani, A. R. (2022). Pengaruh perencanaan kinerja, pengukuran kinerja, pelaporan kinerja, evaluasi kinerja, dan capaian kinerja terhadap akuntabilitas kinerja. *Jurnal Magister Manajemen Nobel Indonesia*, 3(6).
- Arif, M. Z., Sabrina, N., & Sahri, Y. (2023). Pengaruh Independensi, Mekanisme Corporate Governance dan Kualitas Audit Terhadap Integritas Laporan Keuangan. *Jurnal Simki Economic*, 6(2). <https://doi.org/10.29407/jse.v6i2.354>

- Arifin, A. L., & Takrim, M. (2021). Integritas Dan Kepemimpinan Milenial: Kasus Pada HR Leader. *Anterior Jurnal*, 20(3). <https://doi.org/10.33084/anterior.v20i3.2115>
- Aslam, N. (2022). Pencegahan Korupsi Di Sektor BUMN Dalam Perspektif Pelayanan Publik di Indonesia. *Integritas : Jurnal Antikorupsi*, 7(2). <https://doi.org/10.32697/integritas.v7i2.818>
- Gadzali, S. S. (2022). Telaah Komitmen Organisasi: Pengaruh Atas Penilaian Kinerja, Perencanaan Karier dan Partisipasi Karyawan. *Jurnal Aplikasi Bisnis Dan Manajemen*. <https://doi.org/10.17358/jabm.8.2.534>
- Hendi, H., Irawati, I., & Candradewini, C. (2019). Perencanaan Kinerja: Suatu Studi Tentang Pengaruh Sasaran Kerja Pegawai Negeri Sipil (Skp) Terhadap Kinerja Pegawai Pada Badan Daerah Di Kabupaten Merangin. *Jurnal Manajemen Pelayanan Publik*, 2(2). <https://doi.org/10.24198/jmpp.v2i2.20608>
- intan Permatasari. (2018). Pengaruh Independensi Dan Kompetensi Auditor Terhadap Kualitas Audit Internal". *Jurnal Akutansi, Audit Dan Sistem Informasi Akutansi (JASa)*, 2(3).
- Kadarisman, M. (2019). Efektivitas Kinerja Aparatur Sipil Negara Dalam Pelayanan Administrasi di Kota Depok. *Jurnal Ilmu Administrasi: Media Pengembangan Ilmu Dan Praktek Administrasi*, 16(1). <https://doi.org/10.31113/jia.v16i1.202>
- kementerian keuangan. (2022). *Pemulihan Ekonomi Terjaga, Kerja Keras APBN Berlanjut di Tahun 2022*. Kemenkeu.Go.Id.
- Khoiriyah, I. M., Ari, A., & Rizal, F. (2020). Hubungan Fungsi Perencanaan Kepala Ruangan dengan Kinerja Perawat dalam Memberikan Pelayanan Keperawatan di Ruang Rawat Inap RSUD Samarinda. *Borneo Student Research*, 1(3).
- Kusmayadi, & Kaihatu, A. (2017). Strategi Pengembangan Desa Wisata Yenwaupnor Kabupaten Raja Ampat Provinsi Papua Barat. *Jurnal Sains Terapan Pariwisata*, 2(3).
- marni. (2022). "Pengaruh Iklim Organisasi, Pendidikan dan Budaya Kerja Terhadap Kinerja Aparatur Sipil Negara (ASN) Pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (BAPPEDA) Kabupaten Donggala". *OSF Preprints*.
- Mukmin, B. (2020). Manajemen Pemasaran Jasa Sekolah Dasar Terpadu. *Jurnal Isema : Islamic Educational Management*, 5(1). <https://doi.org/10.15575/isema.v5i1.6076>
- Mustafa, A.-. (2021). Manajemen Sdm Berbasis Teknologi Informasi Dan Komunikasi. *An Nadwah*, 26(2). <https://doi.org/10.37064/nadwah.v26i2.9586>
- Pratama, T. A., Halim, A., & Heriyanto, Y. (2020). Analisis Kinerja Aparatur Sipil Negara Di Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Cirebon. *Jurnal Ilmiah Publika*, 7(2). <https://doi.org/10.33603/publika.v7i2.4031>
- Rambu Ana, A. T., & Ga, L. L. (2021). Analisis Akuntabilitas Dan Transparansi Pelaporan Keuangan Bumdes (Studi Kasus Bumdes Ina Huk). *Jurnal Akuntansi : Transparansi Dan Akuntabilitas*, 9(1). <https://doi.org/10.35508/jak.v9i1.3991>

- Sasmito, Y. (2022). Analisis Profesionalitas Aparatur Sipil Negara Berdasarkan Pengukuran Indeks Profesionalitas ASN (IP ASN) di Badan Perencanaan Pembangunan dan Penelitian Pengembangan Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. *Nakhoda: Jurnal Ilmu Pemerintahan*, 21(1). <https://doi.org/10.35967/njip.v21i1.262>
- Syarief Hidayatulloh, F. (2023). Hubungan Beban Kerja, Perencanaan SDM, dan Kinerja Guru. *Journal of Education and Teaching (JET)*, 4(1). <https://doi.org/10.51454/jet.v4i1.231>
- Tri Saputra, R., Ratnasari, S. L., & Tanjung, R. (2020). Pengaruh Manajemen Talenta, Perencanaan Sdm, Dan Audit Sdm Terhadap Kinerja Karyawan. *Jurnal Trias Politika*, 4(1). <https://doi.org/10.33373/jtp.v4i1.2446>
- Utomo, P. B., Purnomo, M. E., & Nazarudin, M. (2021). Studi Perencanaan Manajemen Sumber Daya Manusia Tenaga Pendidik di SD Islam Palembang. *Studia Manageria*, 3(1), 83–97. <https://doi.org/10.19109/studiamanageria.v3i1.6814>
- Wongkar, D. L., Senduk, V., & Tanor, L. (2021). Pengaruh Anggaran Berbasis Kinerja Terhadap Kinerja Aparatur Pemerintah Daerah di Kabupaten Minahasa. *Jurnal Akuntansi Manado (JAIM)*. <https://doi.org/10.53682/jaim.v2i1.630>
- Yanti, F. (2020). Pengembangan Kompetensi Aparatur Sipil Negara Di Era. *Academia*, 5(1)